RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025-2029





RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025–2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2025–2029. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya (2021–2026), analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam periode jangka menengah.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam periode jangka menengah dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029.

Tanjungpinang, 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS SOSIAL

Dr. MAHADI RAHMAN, S.Q., M.Pd.I.
NIP. 19720112 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ i

DAFTAR ISI ____ ii

BAB I PENDAHULUAN ____ 1

1.1 Latar Belakang ____ 1

1.2 Landasan Hukum ____ 4

1.3 Maksud dan Tujuan ____ 8

1.4 Sistematika Penulisan ____ 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ____ 11

2.1 Gambaran Pelayanan PD ____ 11

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD ____ 11

A. Tugas dan Fungsi PD ____ 11

B. Struktur PD ____ 12

2.1.2 Sumber Daya PD ____ 20

A. Pegawai Aparatur Sipil Negara ____ 20

B. Prasarana dan Sarana ____ 23

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD ____ 23

A. Capaian Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya ____ 24

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD ____ 30

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan ____ 34

A. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ____ 34

B. SDM Non-aparatur Kesejahteraan Sosial ____ 36

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD ____ 36

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD ____ 37

2.2.2 Isu Strategis PD ____ 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ____ 39

3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan RPJMD ____ 39

3.2 Tujuan dan Sasaran PD ____ 40

3.2.1 Tujuan PD ____ 40

3.2.2 Sasaran PD ____ 40

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan PD _____ 43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN _____ 45
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD _____ 46
4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah _____ 58
4.3 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) _____ 62
4.4 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) _____ 63
BAB V PENUTUP _____ 66
5.1 Kesimpulan _____ 66
5.2 Kaidah Pelaksanaan _____ 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah PNS menurut pangkat/golongan _____ 21
Tabel 2 : Jumlah pegawai ASN menurut jabatan _____ 21
Tabel 3 : Jumlah pegawai ASN menurut jenjang pendidikan _____ 22
Tabel 4 : Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial _____ 23
Tabel 5 : Lima pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial _____ 24
Tabel 6 : Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 _____ 26
Tabel 7 : Kelompok Sasaran Dinas Sosial _____ 31
Tabel 8 : Jenis-jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 _____ 34
Tabel 9 : Jumlah PSKS di Provinsi Kepulauan Riau _____ 36
Tabel 10 : Jumlah SDM non-aparatur kesejahteraan sosial _____ 36
Tabel 11 : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial _____ 42
Tabel 12 : Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial _____ 43
Tabel 13 : Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial _____ 51
Tabel 14 : Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Sosial _____ 58
Tabel 15 : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial _____ 62
Tabel 16 : Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial _____ 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur organisasi Dinas Sosial _____ 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang hendak dicapai dalam periode tersebut diarahkan dengan visi, "*Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya*".

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan PD untuk periode jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Renstra PD bersifat indikatif, yakni data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran/hasil yang tercantum di dalam Renstra PD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga bersifat fleksibel.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah provinsi, Renstra PD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. sebagai salah satu acuan PD setiap tahunnya dalam menyusun rencana kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun dengan kerangka anggaran yang masih bersifat indikatif;
b. sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan program/kegiatan PD terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh PD dalam periode jangka menengah; dan

c. sebagai salah satu acuan PD kabupaten/kota dalam menyusun Renstra PD kabupaten/kota.

Berdasarkan *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*, proses penyusunan RPJMD dan Renstra PD secara garis besar terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
2. pembahasan visi dan misi RPJMD secara teknokratik;
3. penyusunan Ranwal RPJMD dan Renstra PD;
4. pelaksanaan forum konsultasi publik Ranwal RPJMD;
5. pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD;
6. pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD;
7. konsultasi Ranwal RPJMD;
8. penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD;
9. penyusunan rancangan Renstra PD;
10. pelaksanaan forum PD;
11. verifikasi rancangan Renstra PD;
12. penyusunan rancangan RPJMD;
13. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
14. perumusan Rankhir RPJMD;
15. reviu APIP terhadap Rankhir RPJMD;
16. penyampaian Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD;
17. pembahasan Ranperda RPJMD;
18. evaluasi Ranperda RPJMD;
19. penetapan Ranperda RPJMD;
20. perumusan Rankhir Renstra PD;
21. reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD;
22. verifikasi Rankhir Renstra PD.
23. penetapan Renstra PD.

Data dan informasi perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dijadikan sebagai bahan kajian/analisis dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

1. regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan PD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun lalu;
4. data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam periode jangka menengah terakhir;
5. regulasi yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
6. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Renstra Kementerian Sosial RI;
8. Renstra Dinas Sosial kabupaten/kota;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau; dan
10. regulasi dan informasi lainnya yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Perencanaan pembangunan dalam periode jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial provinsi selanjutnya menjadi salah satu acuan setiap tahunnya dalam menyusun Renja Dinas Sosial provinsi. Di lain pihak, Renstra Dinas Sosial provinsi juga menjadi salah satu acuan Dinas Sosial kabupaten/kota dalam menyusun Renstra Dinas Sosial kabupaten/kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 887).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah adanya keselarasan terhadap RPJMD dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan indikasi rencana program pada Urusan Sosial yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah:

1. Memberikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Sosial yang disusun setiap tahun.
2. Memberikan acuan bagi aparatur pada Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang:** Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. **Landasan Hukum:** Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. **Maksud dan Tujuan:** Memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.
4. **Sistematika Penulisan:** Berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan PD

a. **Tugas, Fungsi, dan Struktur PD:** Memuat informasi tentang tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

b. **Sumber Daya PD:** Mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

c. **Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD:** Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya.

d. **Kelompok Sasaran Pelayanan PD:** Memuat kelompok sasaran yang menjadi objek pelayanan PD.

e. **Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan:** Memuat pihak-pihak eksternal yang menjadi mitra PD dalam pemberian pelayanan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis PD

a. **Permasalahan Pelayanan PD:**

1) Mengidentifikasi permasalahan dari *Bab II Rancangan Awal RPJMD* yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS RPJMD, atau hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

2) Mengidentifikasi isu global, nasional, dan/atau regional yang dapat memengaruhi kinerja PD, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain RPJMN, Renstra K/L, laporan resmi lembaga pemerintah, Laporan KLHS RPJMD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

b. **Isu Strategis PD:** Merumuskan isu-isu strategis bagi PD yang disimpulkan dari identifikasi permasalahan, identifikasi isu-isu lingkungan dinamis, dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. **Tujuan dan Sasaran PD:** Tujuan dan sasaran Renstra PD yang penentuannya didasarkan pada:

    a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan

    b. Sasaran RPJMD.

2. **Strategi dan Arah Kebijakan PD:** Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai Sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. **Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD:** Memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif PD dalam periode jangka menengah.

2. **Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):** IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diperoleh dari indikator tujuan/sasaran PD yang terseleksi.

3. **Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK):** IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat antara lain kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan PD

Bagian ini menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD serta hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya dan data-data lainnya yang relevan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perincian tugas, fungsi, dan struktur organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

A. Tugas dan Fungsi PD

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur PD

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sebagai dinas dengan tipe A, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

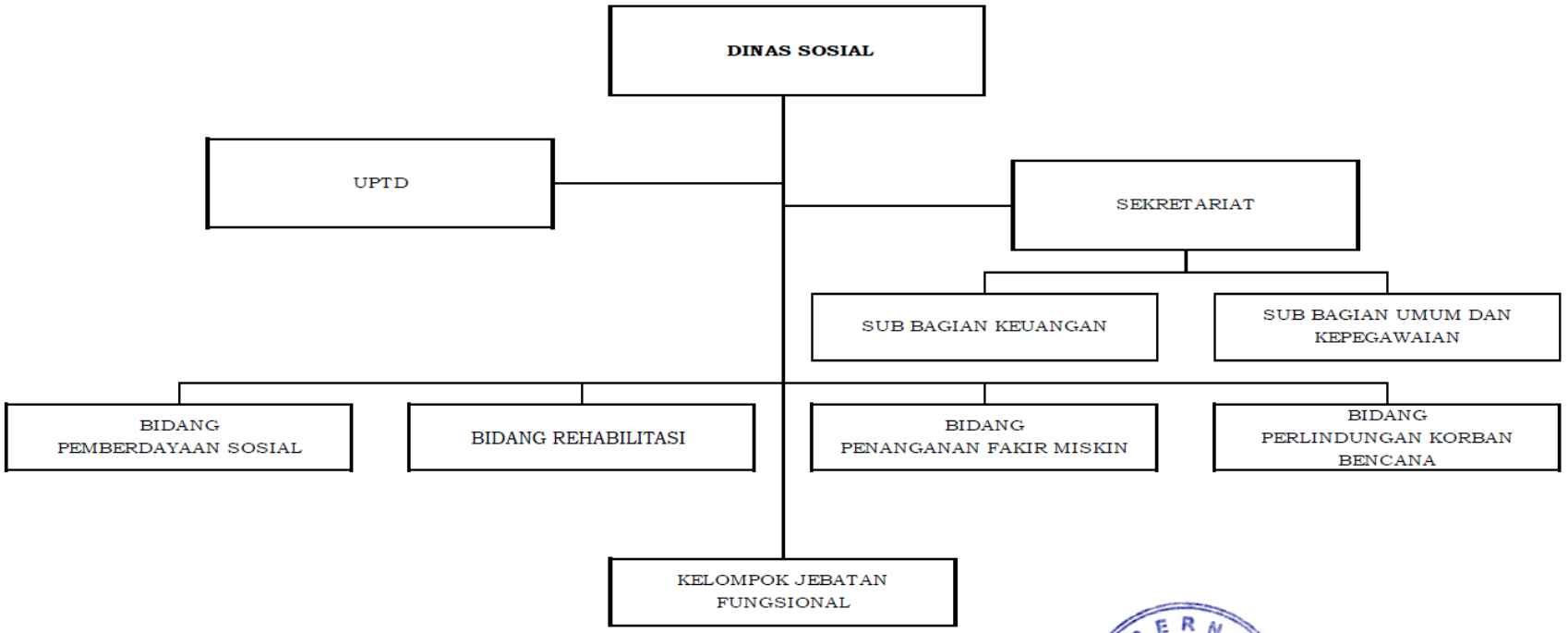
1. Sekretariat
    a. Subbagian Keuangan; dan
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
5. Bidang Perlindungan Korban Bencana

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 : Struktur organisasi Dinas Sosial

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

c. penyiapan bahan dan mengoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;

d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;

f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;

h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

i. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;

j. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial Perorangan dan Keluarga;

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;

e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan Lembaga kesejahteraan sosial;

f. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;

g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah;

h. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

i. pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi;

j. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

b. pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;

c. pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;

d. pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;

e. pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;

g. pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

h. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensoris;

i. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;

j. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial Gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga;

k. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;

l. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

m. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

n. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian program Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

f. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

i. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian program Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

j. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Korban Bencana

Bidang Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Penyediaan dan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Korban Bencana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan dan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penyediaan Permakanan dan Sandang;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian Seksi Penyediaan Permakanan dan Sandang;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan Seksi Penyediaan Permakanan dan Sandang;

e. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian Seksi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan subkoordinator Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;

g. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian program Pelayanan Dukungan Psikososial;

h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program Pelayanan Dukungan Psikososial;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Daya PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia (SDM) serta dan sarana dan prasarana.

A. Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai aparatur sipil negara (pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah PNS pada Dinas Sosial berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Jumlah PNS menurut pangkat/golongan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
a	GOL IV	7	2			9	13,64%
b	GOL III	13	13			26	39,39%
c	GOL II	1	1			2	3,03%
d	GOL IX (PPPK)			5	11	16	24,24%
e	GOL V (PPPK)			6	5	11	16,67%
f	GOL III (PPPK)			2		2	3,03%
JUMLAH						**66**	**100,00%**

Berikutnya, jumlah ASN menurut jabatan pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Jumlah pegawai ASN menurut jabatan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
JABATAN STRUKTURAL							
a	PEJABAT ESELON II	1				1	8,33%
b	PEJABAT ESELON III	4	2			6	50,00%
c	PEJABAT ESELON IV	5				5	41,67%
JUMLAH						**12**	**100,00%**
JABATAN FUNGSIONAL							
a	FUNGSIONAL ARSIPARIS					0	0,00%
b	FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL	5	4		2	11	20,37%
c	FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL	4	4	1		9	16,67%
d	FUNGSIONAL PERENCANA	1				1	1,85%
e	FUNGSIONAL UMUM	4	3	12	14	33	61,11%
JUMLAH						**54**	**100,00%**

Selanjutnya, jumlah pegawai ASN pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 : Jumlah pegawai ASN menurut jenjang pendidikan

No	Klasifikasi	Status Kepegawaian				Jumlah	Persentase
		ASN					
		PNS		PPPK			
		L	P	L	P		
a	S2	9	3			12	18,18%
b	S1	9	11	5	11	36	54,55%
c	D3	2				2	3,03%
d	D2					0	0,00%
e	D1					0	0,00%
f	SMA	1	2	6	5	14	21,21%
g	SLTP			2		2	3,03%
h	SD					0	0,00%
JUMLAH						**66**	**100,00%**

Berdasarkan data pegawai ASN pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kuantitas, pegawai ASN pada Dinas Sosial yang saat ini berjumlah **66 orang** masih di bawah kebutuhan jumlah pegawai ASN. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Dinas Sosial, jumlah ideal seharusnya sebanyak 85 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 19 orang.

2. Ditinjau dari segi kualitas, pegawai ASN Dinas Sosial saat ini dirasa belum memadai berdasarkan analisis sebagai berikut:

    - Dilihat dari tingkat pendidikan, **27,27%** pegawai ASN Dinas Sosial belum mencapai tingkat pendidikan S1. Untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dari sisi pendidikan, perlu adanya upaya kebijakan penyetaraan pendidikan pada ASN yang masih di bawah sarjana.

    - Dilihat dari segi kualifikasi, masih banyak pegawai ASN Dinas Sosial yang menduduki jabatan struktural/fungsional yang kurang/tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan penempatan.

3. Ditinjau dari segi kesetaraan gender, rasio antara jumlah pegawai ASN perempuan dan pegawai ASN laki-laki relatif sudah seimbang, yaitu **51 ÷ 49**.

B. Prasarana dan Sarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses; sementara sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Prasarana dan sarana utama yang secara langsung menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

Tabel 4 : Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Sumber Dana
1	Kantor PD	1	Baik	APBD
2	Gardu Sosial/Lumbung Sosial	1	Baik	APBD
3	Rumah Petugas Gudang Bencana	1	Baik	APBD
4	Hanggar	1	Baik	APBD
5	Mobil Dinas	3	Baik	APBD
6	Motor Dinas	5	Baik	APBD
7	AC	26	Baik	APBD
8	Komputer (PC)	12	Baik	APBD
9	Laptop	32	Baik	APBD
10	Televisi	4	Baik	APBD
11	Printer	11	Baik	APBD
12	Kursi	138	Baik	APBD
13	Meja	57	Baik	APBD
14	Sofa	5	Baik	APBD
15	Lemari	5	Baik	APBD
16	Kamera Digital	4	Baik	APBD
17	Dispenser	3	Baik	APBD
		309		

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar PPKS. Berdasarkan *Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,* penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui lima pilar sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

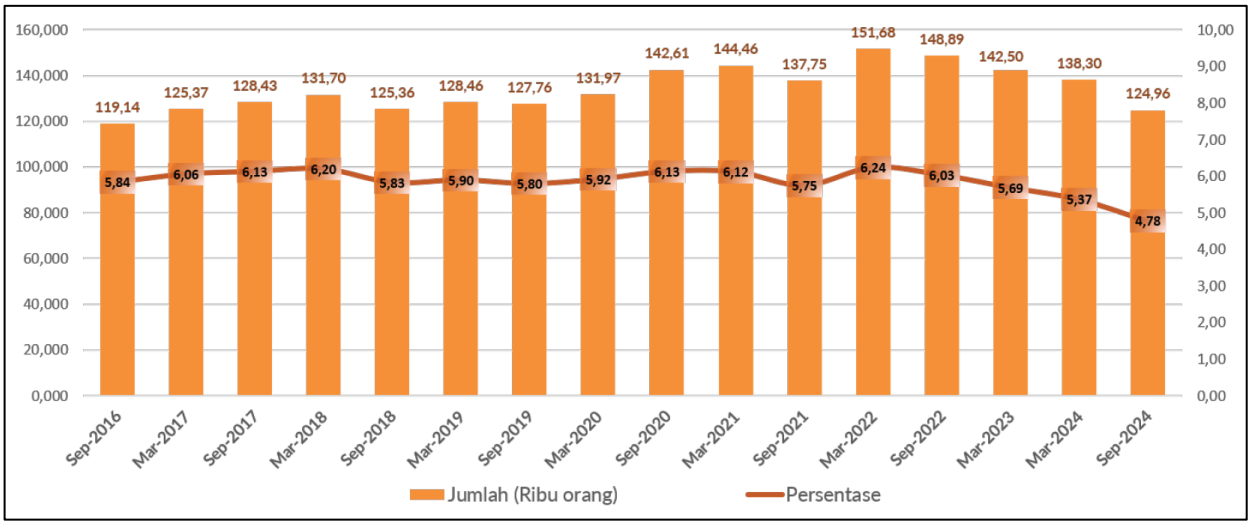
Tabel 5 : Lima pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Penyelenggaraan Kessos	Pengertian
1	perlindungan dan jaminan sosial	setiap upaya dalam bentuk bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin
2	rehabilitasi sosial	proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PPKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat
3	pemberdayaan sosial	setiap upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan PSKS dalam penanganan PPKS
4	pengelolaan taman makam pahlawan	pembangunan dan/atau pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
5	penanganan bencana	setiap upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan sosial dan kerentanan sosial

A. Capaian Pelaksanaan Renstra Periode Sebelumnya

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian di bidang Sosial. Secara umum, pada periode September 2016–September 2024 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 2016–September 2024 ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, September 2016–September 2024



Selain kemiskinan, salah satu fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial ialah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini diwujudkan pada penyelenggaraan rehabilitasi sosial di dalam panti serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian seratus persen setiap tahunnya.

Namun, hal-hal berikut ini terlihat belum optimal:

1. Pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi bagi SDM Kesejahteraan Sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana).
2. Pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pemeliharaan taman makam pahlawan.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki UPTD panti sosial sampai dengan tahun 2025. Meskipun demikian, agar Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam periode tersebut diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 6 : Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026

No	Program	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	0,17	0,15	0,20	0,73	0,42	0,42	0,32	0,17	0,73	0,42
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga	0,79	0,71	13,02	13,05	9,20	9,20	13,52	13,06	13,05	9,20
			Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	2,98	3,27	5,63	5,63	5,63	35,71	10,42	6,49	5,63	5,63
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	52,00	46,00	32,61	32,61	32,61	44,80	40,80	24,22	32,61	32,61
3	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam panti	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial provinsi	Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tingkat provinsi	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial	33,33	33,33	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11

No	Program	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel Capaian pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

    a. Indikator *"Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif"* menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Target pada tahun 2024 sebesar 0,20% dengan proyeksi meningkat tajam menjadi 0,73% pada 2025, lalu turun ke 0,42% pada 2026. Realisasi capaian pada 2024 sebesar 0,17%, sesuai dengan target, dan diproyeksikan meningkat pada tahun berikutnya.

    b. Indikator *"Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga"* mengalami peningkatan signifikan pada 2024 dengan target dan realisasi sekitar 13%, kemudian diproyeksikan menurun menjadi 9,20% pada 2026.

    c. Indikator *"Persentase kabupaten/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu"* konsisten mencapai 100% setiap tahun, baik target maupun realisasi, menandakan komitmen penuh dalam pemutakhiran data sosial.

2. **Program Pemberdayaan Sosial**

    a. Indikator *"Persentase lembaga/organisasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi"* menunjukkan tren kenaikan, dengan target 5,63% pada 2024 dan proyeksi tetap hingga 2026. Realisasi pada 2024 sebesar 6,49%, melebihi target yang ditetapkan.

    b. Indikator *"Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi"* mengalami penurunan target dari 52% pada 2022 menjadi 32,61% pada 2024–2026. Realisasi pada 2024 sebesar 24,22%, di bawah target yang ditetapkan.

3. **Program Rehabilitasi Sosial**

    a. Seluruh indikator pada program ini, seperti *"Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan*

rehabilitasi sosial di dalam panti", selalu ditargetkan dan terealisasi pada angka 100% setiap tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan penuh dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan di dalam panti.

b. Indikator *"Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia"* juga konsisten realisasinya setiap tahun.

4. Program Penanganan Bencana

a. Indikator *"Persentase korban bencana alam dan sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar"* selalu mencapai 100% setiap tahun, baik pada target maupun realisasi, menunjukkan respons yang optimal terhadap kebutuhan dasar korban bencana.

b. Indikator *"Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tingkat provinsi"* mulai ditargetkan 100% sejak 2024, dan realisasi pada tahun tersebut juga mencapai 100%, dengan proyeksi konsisten hingga 2026.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator *"Persentase taman makam pahlawan yang dikelola"* Dinas Sosial mengalami penurunan target dari 33,33% pada 2022–2023 menjadi 11,11% pada 2024–2026. Realisasi juga mengikuti tren ini, dengan capaian tetap pada 11,11% sejak 2023.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator *"Persentase capaian indikator kinerja bidang urusan Sosial"* selalu mencapai 100% setiap tahun, baik pada target maupun realisasi, mencerminkan pelaksanaan urusan sosial yang optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan PD tepat sasaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok sasaran yang perlu diintervensi oleh PD sesuai tugas dan fungsi PD. Berikut adalah uraian mengenai kelompok-kelompok sasaran tersebut, disertai dengan deskripsi ringkas dan data jumlah terkini:

Tabel 7 : Kelompok Sasaran Dinas Sosial

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
A	**Bidang Penanganan Fakir Miskin**		
	Keluarga kurang mampu	Keluarga yang tingkat kesejahteraannya dalam rentang desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	210.990 KK
B	**Bidang Pemberdayaan Sosial**		
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kemensos, Dinsos provinsi, dan/atau Dinsos kab./kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.	80 org
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Warga yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	175 org
3	Pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan	Pejuang adalah veteran pejuang RI sebagaimana dimaksud dalam *UU Nomor 15 Tahun 2012*. Perintis kemerdekaan adalah orang yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan RI. Keluarga pahlawan adalah suami, istri, anak kandung, atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional.	433 org
	Lembaga Penyelenggara Pemberdayaan Sosial		**336 lbg**
4	• Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Sistem pelayanan yang membantu masyarakat kurang mampu dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tersedia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. SLRT berada di tingkat kab./kota.	14 lbg
5	• Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Perpanjangan tangan SLRT di tingkat desa/ kelurahan.	14 lbg
6	• Karang Taruna	Organisasi kepemudaan di tingkat desa/ kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab	200 lbg

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
		sosial, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.	
7	• Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Gerakan sosial di tingkat RT/RW atau desa/ kelurahan yang dibentuk oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga melalui pendekatan kolaboratif di tingkat komunitas. Contoh: kelompok arisan, PKK, paguyuban, posyandu, kelompok tani, atau majelis taklim yang memiliki program sosial.	53 lbg
8	• *Family Care Unit (FCU)*	Unit pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan yang melakukan pendampingan, perlindungan, dan penguatan terhadap keluarga bermasalah sosial.	28 lbg
9	• Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga non-pemerintah yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan, penyebaran informasi, dan perujukan klien ke lembaga lain.	7 lbg
10	• Forum *Corporate Social Responsibility (CSR)*	Wadah bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.	12 lbg
11	• Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	Lembaga non-pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kab./kota yang menjadi mitra pemerintah dengan tugas mengoordinasikan berbagai organisasi sosial yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial, dan berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	8 lbg
C	**Bidang Rehabilitasi Sosial**		
1	Anak terlantar di dalam panti	Orang berusia 6–18 tahun yang tidak mendapatkan hak asuh dari keluarganya atau ditelantarkan oleh keluarganya. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, "anak terlantar" juga mencakup "balita terlantar" (0–5 tahun).	595 org
2	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di dalam panti	Orang berusia 6–18 tahun yang memenuhi salah satu kriteria berikut: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;	10

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
		d. anak yang mendapat perlakuan salah.	
2	Lanjut usia terlantar di dalam panti	Orang berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, atau papannya, atau terlantar secara psikis dan sosial.	103 org
3	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	65 org
4	Gelandangan dan pengemis di dalam panti	Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup mengembara di tempat umum serta tidak memiliki pekerjaan yang stabil.	10 org
5	Tunasosial di dalam panti	Tunasusila, pemulung, kelompok minoritas (yaitu waria, gay, lesbian), bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP).	25 org
6	Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI Bermasalah)	PMI yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, ketelantaran, atau disharmoni sosial. **Kewenangan** pemerintah provinsi ialah memulangkan PMI bermasalah dari titik debarkasi di provinsi ke kab./kota asal.	
D	**Bidang Perlindungan Korban Bencana**		
1	Korban bencana alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. **Contoh bencana alam:** gempa bumi karena faktor alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor alam, hama penyakit tanaman, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa.	
2	Korban bencana non-alam	Korban bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. **Contoh bencana non-alam:** gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran hutan/lahan karena faktor manusia, kebakaran gedung dan permukiman karena faktor manusia, wabah penyakit.	
3	Korban bencana sosial	Korban bencana yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang menimbulkan kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis	

No	Kelompok Sasaran PD	Deskripsi	Jumlah
		pada masyarakat terdampak. **Contoh bencana sosial:** konflik sosial antar-kelompok, terorisme.	

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Subbab ini akan menguraikan pihak-pihak yang menjadi mitra PD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

A. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 8 : Jenis-jenis PSKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012

No	Jenis PSKS	Deskripsi
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	Pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Warga masyarakat (minimal 18 tahun) yang secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial, telah mengikuti pelatihan PSM, dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Warga masyarakat (13–45 tahun) yang secara sukarela turut berperan aktif dalam penanggulangan bencana
4	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Wanita (18–59 tahun) yang mampu menggerakkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya
5	Penyuluh Sosial	1. Penyuluh sosial fungsional, yaitu PNS (maksimal 50 tahun) yang mempunyai jabatan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyuluhan sosial; 2. Penyuluh sosial masyarakat, yaitu tokoh masyarakat (25–60 tahun) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat Bidang Kesejahteraan Sosial yang

No	Jenis PSKS	Deskripsi
		berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan sosial.
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, yang berasal dari unsur masyarakat dengan penetapan SK dari Kementerian Sosial
7	Keluarga Pionir	Keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya
8	Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan	–
9	Karang Taruna	Organisasi sosial kemasyarakatan pada tingkat desa/ kelurahan sebagai wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat (13–45 tahun) yang tumbuh atas dasar kesadaran sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
10	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga non-pemerintah yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga melalui pelayanan konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan, penyebaran informasi, dan perujukan klien ke lembaga lain.
12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Gerakan sosial di tingkat RT/RW atau desa/kelurahan yang dibentuk oleh warga setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga melalui pendekatan kolaboratif di tingkat komunitas. Contoh: kelompok arisan, PKK, paguyuban, posyandu, kelompok tani, atau majelis taklim yang memiliki program sosial.
13	Dunia Usaha	Organisasi di bidang usaha, industri barang/jasa, atau produk barang/jasa; atau BUMN/BUMD; atau wirausahawan beserta jaringannya; yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 9 : Jumlah PSKS di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Perseorangan			Berbasis Kelembagaan							
	PSM	TKSK	Tagana	LK3	FCU	LKKS	Karang Taruna	Forum CSR	WKSBM	SLRT	LKS
Tpi	30	4	136	1	0	2	30	0	0	0	27
Batam	10	12	101	1	27	0	50	5	0	1	112
Bintan	29	10	105	1	1	1	40	0	53	1	26
Karimun	63	14	81	1	0	1	40	0	0	0	6
Lingga	44	13	61	1	0	1	20	0	0	0	6
Natuna	0	17	17	1	0	1	10	0	0	0	0
Anambas	7	10	96	1	0	1	10	7	0	0	0
PROVINSI	183	80	597	7	28	7	200	12	53	2	177
	263			486							

B. SDM Non-aparatur Kesejahteraan Sosial

SDM non-aparatur kesejahteraan sosial adalah SDM yang turut mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetapi bukan dari pegawai ASN kesejahteraan sosial dan tidak termasuk PSKS.

Tabel 10 : Jumlah SDM non-aparatur kesejahteraan sosial

No	SDM Non-aparatur	Tpi	Btm	Bin	Krm	Lga	Nat	Anam	Jumlah
1	Pendamping Kube keluarga miskin	0	0	10	0	0	0	0	10
2	Pendamping UEP	8	6	7	7	2		2	32
3	Pendamping, Operator, dan Korwil PKH	32	99	20	26	17	13	4	211
Jumlah Per Kolom		176	206	142	114	80	30	102	850

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis PD

Penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia dan intervensi yang telah dilakukan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Dinas Sosial, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna, WKSBM, TKSM, belum dapat menunjukkan peran dan fungsinya secara nyata dalam rangka pengentasan PPKS.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum digunakan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.
4. Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Kurangnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian PPKS.
6. Belum optimalnya akurasi data PPKS/PSKS di Provinsi Kepulauan Riau.
7. SDM pelaku pembangunan kesejahteraan, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai.

2.2.2 Isu Strategis PD

Berdasarkan kondisi pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan, inti permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam periode jangka menengah mendatang ialah sebagai berikut:

1. Jangkauan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih rendah.
2. Cakupan pelayanan di UPTD Panti Sosial belum ideal.
3. Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS masih rendah.

4. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan RPJMD

Bagian ini menjelaskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.

Misi 1 RPJMD hanya memiliki satu Tujuan, yaitu:

Tujuan 1.1 : Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Indikator 1 : Laju pertumbuhan ekonomi.
Indikator 2 : Rasio Gini (indeks).
Indikator 3 : PDRB per kapita.

Selanjutnya, dari tujuh Sasaran yang mendukung Tujuan 1.1 RPJMD, **Sasaran** yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial ialah:

Sasaran 1.1.7 : Menurunnya tingkat kemiskinan.
Indikator : Tingkat kemiskinan (%).

Strategi untuk Sasaran 1.1.7 yang ditetapkan dalam RPJMD ialah sebagai berikut:

Tahun 1 : Akselerasi Penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
Tahun 2 : Pengembangan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
Tahun 3 : Penguatan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
Tahun 4 : Pemantapan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
Tahun 5 : Perwujudan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu..

Adapun **Program** Dinas Sosial yang mendukung pencapaian Sasaran 1.1.7 RPJMD ialah sebagai berikut:

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Program Pemberdayaan Sosial.
3) Program Penanganan Bencana.
4) Program Rehabilitasi Sosial.
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran PD adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD dalam periode jangka menengah.

Masing-masing Tujuan dan Sasaran memiliki indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada akhir periode jangka menengah. Indikator-indikator kinerja tersebut selanjutnya akan diperjanjikan dengan Gubernur Kepulauan Riau melalui target tahunan setiap tahunnya dalam periode jangka menengah.

3.2.1 Tujuan PD

Tujuan PD adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi oleh PD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis daerah, Dinas Sosial menetapkan tujuan pembangunan daerah dalam periode jangka menengah sebagai berikut:

Menurunnya tingkat kemiskinan
Indikator: Tingkat kemiskinan.

3.2.2 Sasaran PD

Sasaran PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Perumusan sasaran disertai dengan penetapan indikator kinerja PD dan target untuk kelompok-kelompok sasaran yang dilayani maupun jenis-jenis permasalahan yang ditangani.

Adapun sasaran strategis yang dirumuskan dalam rangka menjawab tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya graduasi menuju kemandirian keluarga miskin.**
   Indikator: Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan.
2. **Terjaminnya mutu pelayanan sosial.**
   Indikator: Nilai penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang disertai dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Sat.	Kondisi Awal		Target						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya tingkat kemiskinan		**Tingkat kemiskinan**	%	**5,69**	**5,37**	**4,40–4,90**	**4,25–4,75**	**4,11–4,61**	**3,94–4,46**	**3,82–4,32**	**3,80–4,30**	**3,82–4,32**
	Meningkatnya graduasi menuju kemandirian keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0,26	0,93	2,33	2,40	2,42	2,50	2,53	2,57	12,18
	Terjaminnya mutu pelayanan sosial	Nilai penerapan Standar Pelayanan Minimal	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100

KETERANGAN

- Tahun 2030 adalah tahun transisi yang menjadi pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
- Kondisi Akhir Sasaran ke-1 merupakan hasil penjumlahan dalam rentang tahun 2025–2029.
- Kondisi Akhir Sasaran ke-2 merupakan nilai rata-rata dari tahun 2025–2029.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan PD

Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 12 : Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya graduasi menuju kemandirian keluarga miskin	1. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan pemberian bantuan kebutuhan dasar.	a. Peningkatan kemandirian keluarga miskin difokuskan pada pemberian bantuan ekonomi produktif.
		b. Peningkatan kapasitas pendamping sosial UEP dan KUBE.
	2. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan penanganan keluarga miskin berdasarkan data permasalahan yang ada.	Penanganan fakir miskin secara proporsional di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil;
	3. Memperkuat kapasitas PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial dan penguatan kelembagaan sosial.	a. Peningkatan profesionalisme PSKS perseorangan melalui bimbingan teknis dan insentif stimulan.
		b. Penguatan kelembagaan sosial melalui pembinaan dan pemberian bantuan operasional.
Terjaminnya mutu pelayanan sosial	1. Melaksanakan refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS).	Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan tunasosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.
	2. Menyediakan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Penyediaan sarana-prasarana difokuskan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) serta perlindungan sosial korban bencana.
	3. Memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma.	Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial pada saat bencana dan pascabencana.

Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, tata laksana, monev, pelaporan, dan koordinasi.	a. Pemenuhan kebutuhan standar operasional prosedur (SOP) dalam berbagai pelaksanaan aktivitas kedinasan PD.
		b. Perluasan cakupan permasalahan yang menjadi sasaran monev, dan pembuatan instrumen monev yang terukur.
		c. Perbaikan mekanisme pengawasan internal bulanan terhadap capaian kinerja dan keuangan PD.
		d. Pengintensifan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program/kegiatan/subkegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu.

    a. Pendekatan kinerja mengandung arti bahwa program/kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

    b. Kerangka pengeluaran jangka menengah mengandung arti bahwa pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan prioritas pembangunan daerah mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

    c. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengandung arti bahwa pengambilan keputusan penetapan program/kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

    Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan penerapan dan rencana pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan PD

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial dalam periode 2025-2029 ialah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
    a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi:
        1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
        2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
        3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
    a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:
        1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
    b. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi:
        1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
        2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
        3) Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
3. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
    a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi:
        1) Penyediaan Permakanan
        2) Penyediaan Sandang
        3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
        4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
        5) Pelayanan Dukungan Psikososial
        6) Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
4. **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
    a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti:

1) Penyediaan Permakanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Alat Bantu
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
12) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti:
1) Pengasuhan
2) Penyediaan Makanan
3) Penyediaan Sandang
4) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar
9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
12) Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
13) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti:
1) Penyediaan Makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Alat Bantu
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar
9) Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
12) Pemulasaraan
13) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

d. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti:
1) Penyediaan Makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
8) Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
9) Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemulangan ke Daerah Asal
11) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

e. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti:
1) Penyediaan Permakanan
2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
3) Pemulangan ke Daerah Asal
4) Pemulasaraan
5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi:

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
   1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara terperinci, program kegiatan, subkegiatan yang disertai dengan target indikator dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, tabel berikut tidak hanya menyajikan target hingga tahun 2029, tetapi juga mencakup **proyeksi target tahun 2030** karena tahun tersebut menandai **periode transisi** menuju RPJMD berikutnya, sehingga target tahun 2030 tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.

RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			UNIT DINAS SOSIAL							**20.689.914.935**		**17.463.926.427**		**18.537.849.560**		**21.447.849.560**		**23.417.849.560**		**29.394.213.987**		**101.557.390.042**
Menurunnya tingkat kemiskinan					**Tingkat Kemiskinan**	%	5,69	4,78	4,48-4,28		4,17-3,77		3,87-3,27		3,56-2,76		3,55-2,26		3,55-2,26		3,55-2,26	
	Meningkatnya graduasi menuju kemandirian keluarga miskin				**Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan**	%	0,26	0,93	2,33		2,40		2,42		2,50		2,53		2,57		12,18	
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	%	8,10	16,15	4,34	**2.175.660.952**	0,40	**201.288.000**	3,22	**495.285.133**	3,65	**1.163.770.266**	4,03	**1.609.512.266**	3,89	**2.334.375.693**	15,64	**5.645.516.618**
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	%	100,00	100,00	100,00	**673.522.856**	100,00	**871.100.000**	100,00	**871.100.000**	100,00	**871.100.000**	100,00	**871.100.000**	100,00	**871.100.000**	100,00	**4.157.922.856**
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	0,19	0,26	0,17	**1.061.015.305**	0,01	**100.644.000**	0,13	**523.600.000**	0,16	**1.236.514.867**	0,19	**1.682.256.867**	0,19	**3.471.456.867**	0,67	**4.604.031.039**
					PAGU PROGRAM					**3.910.199.113**		**1.173.032.000**		**1.889.985.133**		**3.271.385.133**		**4.162.869.133**		**6.676.932.560**		**14.407.470.512**
		1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**						**3.910.199.113**		**1.173.032.000**		**1.889.985.133**		**3.271.385.133**		**4.162.869.133**		**6.676.932.560**		**14.407.470.512**
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	org	399	553	367	1.061.015.305	26	100.644.000	130	523.600.000	317	1.236.514.867	431	1.682.256.867	890	3.471.456.867	1.271	4.604.031.039
		1.06.05.1.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	org	17.090	34.071	9.150	2.175.660.952	850	201.288.000	2.040	495.285.133	4.670	1.163.770.266	6.292	1.609.512.266	8.885	2.334.375.693	23.002	5.645.516.618
		1.06.05.1.02.08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/ Kota	7	7	7	673.522.856	7	871.100.000	7	871.100.000	7	871.100.000	7	871.100.000	7	871.100.000	7	4.157.922.856
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnya pemberdayaan sosial**	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	%	40,00	30,59	31,37	**81.975.881**	1,57	**33.548.000**	42,35	**100.000.000**	42,35	**320.000.000**	42,35	**320.000.000**	42,35	**385.185.000**	64,31	**855.523.881**
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	10,42	8,93	0,89	**304.937.204**	2,38	**278.384.000**	2,38	**325.000.000**	2,38	**505.000.000**	2,38	**625.000.000**	2,38	**1.225.000.000**	10,42	**2.038.321.204**
					Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	%	-	-	-	-	100,00	**56.600.000**	100,00	**645.600.000**	100,00	**1.165.200.000**	100,00	**1.165.200.000**	100,00	**1.684.800.000**	100,00	**3.032.600.000**
					PAGU PROGRAM					**386.913.085**		**368.532.000**		**1.070.600.000**		**1.990.200.000**		**2.110.200.000**		**3.294.985.000**		**5.926.445.085**
		1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**8.527.300**		**10.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**93.527.300**
		1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dok			1	8.527.300	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	93.527.300
		1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**						**378.385.785**		**358.532.000**		**1.045.600.000**		**1.965.200.000**		**2.085.200.000**		**3.269.985.000**		**5.832.917.785**
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	lbg	35	30	3	296.409.904	8	268.384.000	8	300.000.000	8	480.000.000	8	600.000.000	8	1.200.000.000	35	1.944.793.904
		1.06.02.1.02.08	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	org	102	78	80	81.975.881	4	33.548.000	108	100.000.000	108	320.000.000	108	320.000.000	108	385.185.000	164	855.523.881
					PSM	org	24						28		28		28		28		84	
					TKSK	org	78	78	80		4		80		80		80		80		80	
		1.06.02.1.02.11	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	org					1250	56.600.000	1250	645.600.000	1250	1.165.200.000	1250	1.165.200.000	1250	1.684.800.000	5.000	3.032.600.000
	Terjaminnya mutu pelayanan sosial				**Nilai penerapan Standar Pelayanan Minimal**		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	%	100,00	100,00	100,00	**339.748.580**	100,00	**1.365.400.000**	100,00	**392.000.000**	100,00	**784.000.000**	100,00	**1.357.000.000**	100,00	**1.960.000.000**	100,00	**4.238.148.580**
					PAGU PROGRAM					**339.748.580**		**1.365.400.000**		**392.000.000**		**784.000.000**		**1.357.000.000**		**1.960.000.000**		**4.238.148.580**
		1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**						**339.748.580**		**1.365.400.000**		**392.000.000**		**784.000.000**		**1.357.000.000**		**1.960.000.000**		**4.238.148.580**
					PAGU KEGIATAN					**339.748.580**		**1.365.400.000**		**392.000.000**		**784.000.000**		**1.357.000.000**		**1.960.000.000**		**4.238.148.580**
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	org	200	350	100	163.403.059	100	163.400.000	100	180.000.000	200	360.000.000	350	630.000.000	500	900.000.000	170	1.496.803.059
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	org	85		100	24.002.119	100	25.000.000	100	25.000.000	200	50.000.000	350	87.500.000	500	125.000.000	170	211.502.119
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	org	400	350	100	112.588.975	100	112.000.000	100	112.000.000	200	224.000.000	350	392.000.000	500	560.000.000	170	952.588.975

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif								Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.06.06.1.01.11	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	org	200	350	100	39.754.427	100	40.000.000	100	50.000.000	200	100.000.000	350	175.000.000	500	250.000.000	170	404.754.427
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	org					20	15.000.000	20	15.000.000	40	30.000.000	50	37.500.000	100	75.000.000	33	97.500.000
		1.06.06.1.01.16	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	org					287	1.000.000.000		-							287	1.000.000.000
		1.06.06.1.01.17	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	org					100	10.000.000	100	10.000.000	200	20.000.000	350	35.000.000	500	50.000.000	188	75.000.000
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya rehabilitasi sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**479.221.309**	**100,00**	**142.548.000**	**100,00**	**191.000.000**	**100,00**	**256.000.000**	**100,00**	**256.000.000**	**100,00**	**492.000.000**	**100,00**	**1.324.769.309**
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**797.292.403**	**100,00**	**286.644.000**	**100,00**	**597.000.000**	**100,00**	**689.000.000**	**100,00**	**1.074.516.000**	**100,00**	**2.124.032.000**	**100,00**	**3.444.452.403**
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**194.488.235**	**100,00**	**120.000.000**	**100,00**	**201.000.000**	**100,00**	**261.000.000**	**100,00**	**261.000.000**	**100,00**	**492.000.000**	**100,00**	**1.037.488.235**
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**47.689.132**	**100,00**	**62.000.000**	**100,00**	**96.000.000**	**100,00**	**96.000.000**	**100,00**	**96.000.000**	**100,00**	**179.000.000**	**100,00**	**397.689.132**
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**515.669.701**	**100,00**	**40.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**75.000.000**	**100,00**	**150.000.000**	**100,00**	**780.669.701**
					PAGU PROGRAM					**2.034.360.780**		**651.192.000**		**1.160.000.000**		**1.377.000.000**		**1.762.516.000**		**3.437.032.000**		**6.985.068.780**
		1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**						**479.221.309**		**142.548.000**		**191.000.000**		**256.000.000**		**256.000.000**		**492.000.000**		**1.324.769.309**
		1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org		65	65	99.275.373	65	78.548.000	65	45.000.000	65	90.000.000	65	90.000.000	65	180.000.000	65	402.823.373
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org		65	65	21.957.909	65	10.000.000	65	20.000.000	65	40.000.000	65	40.000.000	65	80.000.000	65	131.957.909
		1 06 04 1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	90	65	65	35.144.952	65	-	65	5.000.000	65	5.000.000	65	5.000.000	65	20.000.000	65	50.144.952
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	org		41	12	155.366.000	1	5.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	26.000.000	10	214.366.000
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org		65	65	7.807.962	65	5.000.000	65	8.000.000	65	8.000.000	65	8.000.000	65	16.000.000	65	36.807.962
		1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	90	65	65	147.517.680	65	10.000.000	65	25.000.000	65	25.000.000	65	25.000.000	65	50.000.000	65	232.517.680
		1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org					65	5.000.000	65	25.000.000	65	25.000.000	65	25.000.000	65	50.000.000	65	80.000.000
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org					3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	17.000.000
		1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000
		1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000
		1.06.04.1.01.17	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	org					3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	17.000.000
		1.06.04.1.01.21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	dok			1	12.151.433	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	102.151.433
		1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**						**797.292.403**		**286.644.000**		**597.000.000**		**689.000.000**		**1.074.516.000**		**2.124.032.000**		**3.444.452.403**
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	org		13	3	4.001.645	5	5.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	5	39.001.645
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org		548	310	283.534.000	310	63.548.000	310	300.000.000	310	300.000.000	500	483.871.000	1.000	967.742.000	348	1.430.953.000
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	570	10	10	299.749.045		-		-		-		-		-	10	299.749.045
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org		320	595	26.580.597	310	10.000.000	310	25.000.000	310	25.000.000	500	40.323.000	1.000	80.646.000	405	126.903.597

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	570	998	595	57.082.444	310	43.548.000	310	60.000.000	310	60.000.000	500	96.774.000	1.000	193.548.000	405	317.404.444
		1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org					310	5.000.000	310	60.000.000	310	60.000.000	500	96.774.000	1.000	193.548.000	358	221.774.000
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org					3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	17.000.000
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org					3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	20.000.000
		1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org					3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	20.000.000
		1.06.04.1.02.15	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org		998	595	111.907.687	310	125.548.000	310	92.000.000	310	184.000.000	500	296.774.000	1.000	593.548.000	405	810.229.687
		1.06.04.1.02.17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	dok			1	14.436.985	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	104.436.985
		1.06.04.1.02.22	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	org					10	2.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	17.000.000
		1.06.04.1.02.23	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	org					3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	20.000.000
		1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**						**194.488.235**		**120.000.000**		**201.000.000**		**261.000.000**		**261.000.000**		**492.000.000**		**1.037.488.235**
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	-	103	103	42.216.900	103	26.000.000	103	30.000.000	103	60.000.000	103	60.000.000	103	120.000.000	103	218.216.900
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	-	103	103	34.653.000	103	15.000.000	103	30.000.000	103	60.000.000	103	60.000.000	103	120.000.000	103	199.653.000
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	90	103			103	5.000.000	103	10.000.000	103	10.000.000	103	10.000.000	103	20.000.000	103	35.000.000
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	org		4	4	31.000.000	4	10.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	8	32.000.000	4	89.000.000
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org		103	103	26.834.796	103	10.000.000	103	16.000.000	103	16.000.000	103	16.000.000	103	32.000.000	103	84.834.796
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	90	103	103	32.584.950	103	10.000.000	103	22.000.000	103	22.000.000	103	22.000.000	103	44.000.000	103	108.584.950
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org					103	5.000.000	103	22.000.000	103	22.000.000	103	22.000.000	103	44.000.000	103	71.000.000
		1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org					3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	20.000.000
		1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	org					3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	20.000.000
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	org		2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	50.000.000
		1.06.04.1.03.15	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	org					3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	17.000.000
		1.06.04.1.03.16	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org					3	2.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	17.000.000
		1.06.04.1.03.17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	dok			1	17.198.589	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	107.198.589
		1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**						**47.689.132**		**62.000.000**		**96.000.000**		**96.000.000**		**96.000.000**		**179.000.000**		**397.689.132**
		1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org		10	10	4.983.768	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	24.983.768
		1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org		10	10	4.591.883	10	2.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	21.591.883
		1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	10	10				-	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	15.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org		10	10	963.036	10	1.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	5.000.000	10	7.963.036
		1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org		10	10	6.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	25.000.000	10	41.000.000
		1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	org					10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000
		1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	org					10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000
		1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org					1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	8.000.000
		1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	org	10	10	10	16.706.841	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	96.706.841
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	dok			1	14.443.604	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	104.443.604
		1.06.04.1.04.13	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	org					1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000
		1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**								**40.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**		**150.000.000**		**780.669.701**
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	22	22	90	499.907.259	25	25.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	100.000.000	190	674.907.259
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	dok			1	15.762.442	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	5	105.762.442
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**%**	**11,11**	**11,11**	**11,11**	**550.036.000**	**11,11**	**15.000.000**	**11,11**	**25.000.000**	**11,11**	**25.000.000**	**11,11**	**25.000.000**	**11,11**	**25.000.000**	**55,56**	**640.036.000**
					PAGU PROGRAM					**550.036.000**		**15.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**640.036.000**
		1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**						**550.036.000**		**15.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**640.036.000**
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam	1	1	1	550.036.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	640.036.000
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**BB**	**BB**	**BB**	**13.468.657.377**	**BB**	**13.890.770.427**	**BB**	**14.000.264.427**	**BB**	**14.000.264.427**	**BB**	**14.000.264.427**	**BB**	**14.000.264.427**	**BB**	**69.360.221.085**
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah		**-**	**83,30**	**83,30**		**83,30**		**83,30**		**83,30**		**83,30**		**83,30**		**83,30**	
					PAGU PROGRAM					**13.468.657.377**		**13.890.770.427**		**14.000.264.427**		**14.000.264.427**		**14.000.264.427**		**14.000.264.427**		**69.360.221.085**
		1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**374.132.490**		**450.000.000**		**450.000.000**		**450.000.000**		**450.000.000**		**450.000.000**		**2.174.132.490**
		1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	1	1	11.559.318	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	131.559.318
		1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	1	1	42.880.976	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	642.880.976
		1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	2	2	113.131.467	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	513.131.467
		1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	1	1	1	206.560.729	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	5	886.560.729
		1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.649.124.101**		**11.954.260.427**		**11.954.260.427**		**11.954.260.427**		**11.954.260.427**		**11.954.260.427**		**58.466.165.809**
		1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	468	444	444	10.071.732.101	768	11.374.048.427	768	11.374.048.427	768	11.374.048.427	768	11.374.048.427	768	11.374.048.427	768	55.567.925.809
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	1	1	577.392.000	1	580.212.000	1	580.212.000	1	580.212.000	1	580.212.000	1	580.212.000	5	2.898.240.000
		1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**68.525.904**		**-**		**71.750.000**		**71.750.000**		**71.750.000**		**71.750.000**		**283.775.904**
		1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	1	1	68.525.904			1	71.750.000	1	71.750.000	1	71.750.000	1	71.750.000	4	283.775.904
		1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**24.588.000**		**82.600.000**		**82.600.000**		**82.600.000**		**82.600.000**		**82.600.000**		**354.988.000**
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	pkt	1	1			1	57.600.000	1	57.600.000	1	57.600.000	1	57.600.000	1	57.600.000	4	230.400.000
		1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org		43	8	24.588.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	28	124.588.000
		1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**708.859.343**		**838.110.000**		**842.204.000**		**842.204.000**		**842.204.000**		**842.204.000**		**4.073.581.343**
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	1	1	1	12.282.710	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	72.282.710
		1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	1	1	1	34.939.743	1	35.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	5	165.939.743

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	1	1	1	59.476.492	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	299.476.492
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	1	1	1	47.058.098	1	50.000.000	1	74.900.000	1	74.900.000	1	74.900.000	1	74.900.000	5	321.758.098
		1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	1	1						-		-		-		-	-	-
		1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap	1	1	1	5.822.500	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	29.822.500
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	1	1	549.279.800	1	672.110.000	1	654.304.000	1	654.304.000	1	654.304.000	1	654.304.000	5	3.184.301.800
		1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**424.240.708**		**190.000.000**		**180.000.000**		**180.000.000**		**180.000.000**		**180.000.000**		**1.154.240.708**
		1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	2	11	329.662.915	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	15	669.662.915
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt		1	1	13.116.999	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	113.116.999
		1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	14	17	8	81.460.794	8	80.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	40	371.460.794
		1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**942.560.905**		**145.000.000**		**181.500.000**		**181.500.000**		**181.500.000**		**181.500.000**		**1.632.060.905**
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	1	1	30.670.585	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.670.585
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	1	1	114.248.360	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	5	574.248.360
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	1	1	1	797.641.960		-	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	4	907.141.960
		1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**276.625.926**		**230.800.000**		**237.950.000**		**237.950.000**		**237.950.000**		**237.950.000**		**1.221.275.926**
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	3	5	5	206.152.346	5	150.000.000	5	162.950.000	5	162.950.000	5	162.950.000	5	162.950.000	5	845.002.346
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	63	72	44	29.801.280	44	30.800.000	44	30.000.000	44	30.000.000	44	30.000.000	44	30.000.000	220	150.601.280
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	40.672.300	1	50.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	225.672.300
			UNIT UPTD							-		**1.295.494.000**		**1.462.150.440**		**1.552.150.440**		**1.582.150.440**		**1.677.150.440**		**5.891.945.320**
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya rehabilitasi sosial**	**Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti**	**%**	-	-	-	-	**100,00**	**161.498.000**	**100,00**	**215.383.480**	**100,00**	**215.383.480**	**100,00**	**215.383.480**	**100,00**	**310.383.480**	**100,00**	**807.648.440**
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	**%**	-	-	-	-	**100,00**	**700.000.000**	**100,00**	**760.000.000**	**100,00**	**850.000.000**	**100,00**	**850.000.000**	**100,00**	**850.000.000**	**100,00**	**3.160.000.000**
					PAGU PROGRAM					-		**861.498.000**		**975.383.480**		**1.065.383.480**		**1.065.383.480**		**1.160.383.480**		**3.967.648.440**
		1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**								**161.498.000**		**215.383.480**		**215.383.480**		**215.383.480**		**310.383.480**		**807.648.440**
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org					10	7.500.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	20	50.000.000	10	52.500.000
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org					10	133.998.000	10	160.383.480	10	160.383.480	10	160.383.480	20	160.383.480	10	615.148.440
		1.06.04.1.02.15	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org					10	20.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	20	100.000.000	10	140.000.000
		1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti**							**700.000.000**		**760.000.000**		**850.000.000**		**850.000.000**		**850.000.000**		**3.160.000.000**
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org					90	700.000.000	90	750.000.000	90	750.000.000	90	750.000.000	90	750.000.000	360	2.950.000.000
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	org								-	10	90.000.000	10	90.000.000	10	90.000.000	20	180.000.000
		1.06.04.1.05.18	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	org							2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**79,81**	**83,43**	**83,43**	-	**83,43**	**433.996.000**	**83,43**	**486.766.960**	**83,43**	**486.766.960**	**83,43**	**516.766.960**	**83,43**	**516.766.960**	**83,43**	**1.924.296.880**
					PAGU PROGRAM					-		**433.996.000**		**486.766.960**		**486.766.960**		**516.766.960**		**516.766.960**		**1.924.296.880**
		1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**61.998.000**		**88.383.480**		**88.383.480**		**88.383.480**		**88.383.480**		**327.148.440**
		1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok					1	61.998.000	1	88.383.480	1	88.383.480	1	88.383.480	1	88.383.480	5	327.148.440

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Tahun Transisi		Kondisi Akhir	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025-2029	
							2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**130.000.000**		**130.000.000**		**130.000.000**		**160.000.000**		**160.000.000**		**550.000.000**
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000
		1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000
		1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000
		1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap					1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	310.000.000
		1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**180.000.000**
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt					1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000
		1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000
		1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-	-	-	-	**100,00**	**196.998.000**	**100,00**	**223.383.480**	**100,00**	**223.383.480**	**100,00**	**223.383.480**	**100,00**	**223.383.480**	**100,00**	**867.148.440**
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap					1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap					1	171.998.000	1	198.383.480	1	198.383.480	1	198.383.480	1	198.383.480	4	767.148.440
		1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-		-		-		-		-		-
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit															-	-
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit															-	-
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit															-	-
					PAGU PROGRAM PEMBANGUNAN					**7.221.257.558**		**4.434.654.000**		**5.512.968.613**		**8.512.968.613**		**10.482.968.613**		**16.554.333.040**		**36.164.817.397**
					PAGU PROGRAM PENUNJANG					**13.468.657.377**		**14.324.766.427**		**14.487.031.387**		**14.487.031.387**		**14.517.031.387**		**14.517.031.387**		**71.284.517.965**
					PAGU TOTAL					**20.689.914.935**		**18.759.420.427**		**20.000.000.000**		**23.000.000.000**		**25.000.000.000**		**31.071.364.427**		**107.449.335.362**

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Sosial menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam subkegiatan yang bersifat operasional dan terukur. Uraian subkegiatan berikut ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai bentuk intervensi yang dilakukan Dinas Sosial dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 14 : Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Sosial

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	
			1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			1.06.04.1.01.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.01.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.01.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
			1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
			1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan	
			1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			1.06.04.1.02.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.02.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.02.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
			1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
			1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
			1.06.04.1.03.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1.06.04.1.03.0007 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.03.0010 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.1.03.0011 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan	
			1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
			1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			1.06.04.1.04.0006 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			1.06.04.1.04.0007 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
			1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
			1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
			1.06.04.1.04.0013 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
			1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
			1.06.04.1.05.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
2.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
3.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.06.1.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			1.06.06.1.01.0017 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
1.06.0.00.0.00.06.0001 - UPTD Sosial				

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
4.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	
			1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
			1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke Daerah Asal	
			1.06.04.1.05.0018 - Pemulasaraan	

4.3 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah ukuran keberhasilan PD terseleksi pada level Tujuan dan/atau Sasaran PD yang dianggap paling mendukung Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. IKU Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 15 : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan	%	2,33	2,40	2,42	2,50	2,53	2,57	
2	Nilai penerapan Standar Pelayanan Minimal	%	100	100	100	100	100	100	

Dua IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan.**

   Indikator ini menggambarkan upaya Dinas Sosial dalam mendorong kemandirian keluarga miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan. Target capaian indikator ini secara bertahap meningkat setiap tahun, dimulai dari 2,33% pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 2,53% pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam memperkuat intervensi program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terukur.

2. **Nilai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).**

   Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan sosial dasar yang diberikan oleh Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Target nilai SPM ditetapkan sebesar 100% untuk setiap tahun mulai dari 2025 hingga 2029, yang berarti Dinas Sosial menargetkan pemenuhan seluruh aspek pelayanan dasar sesuai standar minimal yang berlaku setiap tahunnya.

4.4 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah ukuran keberhasilan PD terseleksi pada level Program PD yang dianggap menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan PD. Adapun IKK Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 16 : Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	4,34	0,40	0,97	2,21	2,98	4,21	
2	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	0,17	0,01	0,06	0,15	0,20	0,42	
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	31,37	1,57	42,35	42,35	42,35	50,98	
5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	0,89	2,38	1,49	2,38	2,98	5,95	
6	Persentase Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	%	-	100	100	100	100	100	
7	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
13	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	–	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
14	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	–	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	–	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43	83,43	

Lima IKK yang terkait dengan SPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.**

   Indikator ini mencerminkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar (seperti makanan, tempat tinggal, perawatan, dan rehabilitasi sosial) bagi penyandang disabilitas terlantar yang berada di dalam panti. Target 100% menunjukkan

bahwa seluruh penghuni panti dengan disabilitas harus menerima pelayanan yang layak dan komprehensif.

2. **Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.**

   Indikator ini menggambarkan keberhasilan panti dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak terlantar. Target 100% menegaskan bahwa seluruh anak terlantar yang dirawat di panti harus mendapatkan pelayanan secara penuh dan berkesinambungan.

3. **Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.**

   Indikator ini menunjukkan perhatian terhadap lansia terlantar yang dirawat di dalam panti agar seluruh kebutuhan dasar mereka terpenuhi, termasuk pemeliharaan kesehatan, makanan bergizi, dan tempat tinggal yang layak.

4. **Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.**

   Indikator ini berfokus pada layanan pemulihan sosial bagi gelandangan dan pengemis yang dirawat di panti, dengan memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi selama masa pembinaan.

5. **Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.**

   Indikator ini menunjukkan kesiapsiagaan pelayanan sosial terhadap korban bencana dengan memastikan kebutuhan dasar mereka (seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal) terpenuhi selama dan pasca-tanggap darurat.

Seluruh indikator dengan target 100% menandakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh untuk memastikan tidak ada satu pun penerima layanan yang terabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan kelanjutan dari Renstra periode sebelumnya. Renstra ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Renstra bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan. Jika diperlukan, muatan Renstra dapat direvisi dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan PD dapat tercapai. Revisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya. Renja tersebut seterusnya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial.

Tanjungpinang, 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS SOSIAL

Dr. MAHADI RAHMAN, S.Q., M.Pd.I.
NIP. 19720112 200112 1 005

Kantor Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Raya Dompak, Tanjungpinang - Kepulauan Riau



email: sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com

Renstra Dinsos Prov. Kepri 2025-2029